

## RPSEP-80

### **Evaluasi Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil Menengah oleh PT Jasa Marga, Tbk Cabang Purbaleunyi Kota Bandung**

Yosef Anton Layanan  
Program Magister Manajemen, Fakultas Pascasarjana  
Universitas Katholik Parahyangan  
josefanton@me.com

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini berjudul Evaluasi Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Menengah oleh PT Jasa Marga, Tbk Cabang Purbaleunyi. Tujuan dari Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Menengah yaitu mewujudkan usaha kecil yang tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba perusahaan serta menciptakan daya gerak ekonomi kerakyatan disekitar wilayah operasional perusahaan menjadi meningkat dan pada akhirnya derajat kesejahteraan masyarakat pun dapat meningkat. Penelitian ini menggunakan teori dari Kenneth M. Dolbeare untuk melihat pelaksanaan program, keefektifan program serta dampak yang dihasilkan melalui lima variable yaitu program, tujuan, kegiatan, kriteria efektif dan dampak. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kualitatif. Teknik – teknik pengumpulan data kualitatif yang digunakan yaitu wawancara dengan Staff PU PKBL PT Jasa Marga, Tbk Cabang Purbaleunyi dan mitra binaan. Observasi terhadap usaha – usaha mitra binaan serta beberapa dokumen yang berkaitan dengan program tersebut. Hasil dari penelitian ini, menunjukkan bahwa Program BUMN dengan Usaha Kecil dan Menengah oleh PT Jasa Marga, Tbk Cabang Purbaleunyi efektif. Keefektifan tersebut dapat dilihat dari pengembalian pinjaman yang dikategorikan lancar serta menghasilkan dampak yang positif yaitu semakin terbukanya lapangan pekerjaan. Dengan adanya hasil penelitian mengenai Program Kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan menengah, diharapkan dapat menjadi masukan bagi PT Jasa Marga, Tbk Cabang Purbaleunyi sehingga dapat meningkatkan kinerja yang lebih dalam pelaksanaannya.

**Kata Kunci:**Program, Tujuan, kegiatan, Efektivitas, Kemitraan, BumN, Ukm

#### **PENDAHULUAN**

Pembangunan di Indonesia belum dapat dikatakan merata, hal ini dapat diindikasikan dengan tingginya tingkat angkatan kerja akan tetapi tidak berbanding dengan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap angkatan kerja. Hal tersebut dapat menyebabkan taraf hidup masyarakat yang rendah yang akhirnya berujung pada kesenjangan sosial ekonomi

masyarakat. Keberadaan Usaha Kecil Menengah (UKM) sebagai bagian dari entitas usaha nasional memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat Indonesia. Usaha Kecil Menengah merupakan sebuah entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.<sup>1</sup>

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, namun hingga kini perkembangannya masih jauh tertinggal dibandingkan dengan pelaku ekonomi yang lain. Pengembangan UKM perlu mendapatkan perhatian yang besar baik dari pemerintah maupun masyarakat agar dapat berkembang lebih kompetitif. Namun pada kenyataannya, persoalan umum masih melekat pada usaha kecil menengah yaitu<sup>2</sup> :

1. Kurangnya permodalan dan terbatasnya akses pembiayaan

Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan UKM, oleh karena pada umumnya usaha kecil dan menengah merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup, yang mengandalkan modal dari pemilik usaha yang jumlahnya sangat terbatas, sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh karena persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi. Persyaratan yang menjadi hambatan terbesar bagi UKM adalah adanya ketentuan mengenai agunan karena tidak semua UKM memiliki harta yang memadai dan cukup untuk dijadikan agunan.

2. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang minim dalam mengelola organisasi manajemen baik dalam hal pemasaran, pengetahuan teknologi dan ketidakpahaman dalam membuat laporan. Wawasan pengetahuan yang dimiliki oleh sumber daya manusianya masih kurang dalam mengembangkan usahanya.

---

<sup>1</sup> Yudhislibra. "Usaha Kecil Menengah di Indonesia". Diakses di <http://yudhislibra.wordpress.com> pada tanggal 1 Maret 2011 pkl 19.10 WIB.

<sup>2</sup> Komunitas Perbankan. 2011. "Artikel tentang Usaha Kecil Menengah". Diakses di <http://banking.blog.gunadarma.ac.id> Pada tanggal 1 Maret 2011 pkl 19.05 WIB.

**Tabel 1 Beberapa masalah utama yang terjadi pada Usaha Kecil Menengah (UKM)<sup>3</sup>**

<b>Tipe Masalah</b>	<b>Usaha Kecil Menengah</b>
Kurangnya Modal	40,48%
Bahan Baku	23,75%
Marketing	16,96%
Manajemen & Produksi	3,07%
Persaingan	15,74%
<b>Jumlah</b>	<b>100,00%</b>

Dari tabel di atas, penyebab masalah yang terjadi pada Usaha Kecil dan Menengah yang paling utama dari survey di Jabotabek adalah kurangnya modal untuk mengembangkan usaha UKM tersebut. Bahan baku tidak dapat dibeli karena kekurangan modal. Jika barang – barang modal usaha saja tidak dibeli, maka UKM belum dapat memikirkan untuk melakukan pemasaran terhadap usahanya, dia tidak dapat melakukan promosi agar tempat usahanya dikenal. Apalagi ditambah dengan banyaknya persaingan di satu bidang yang sama karena sama – sama ingin usaha dan usahanya itu berkembang.

Dalam rangka mengurangi dan meminimalisir permasalahan yang dihadapi oleh Usaha Kecil Menengah (UKM) diperlukan suatu badan yang berfungsi sebagai pembantu dan bersifat sebagai pembina. Dimana badan tersebut dapat berasal dari perusahaan-perusahaan yang telah maju dan berkembang pesat serta dapat melakukan tanggung jawab sosialnya (*Corporate Social Responsibility*) masing-masing, dalam hal ini perusahaan tersebut adalah

<sup>3</sup> Wardoyo dan Hendro Prabowo. “Kinerja Lembaga Keuangan Mikro bagi Upaya Penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Di Wilayah Jabotabek”. Diakses di <http://docs.google.com> pada tanggal 1 Maret 2011 pkl 19.15 WIB

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyediakan fasilitas kredit untuk mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah.

Bahwasannya kepedulian pemerintah dalam hal ini Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terhadap Usaha Kecil Menengah (UKM) telah ada sejak lama. Pada tahun 1989 Pemerintah RI melalui Departemen Keuangan, mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1232/KMK.013/1989 yang mewajibkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyisihkan 1 – 5 % keuntungannya untuk Pembinaan Usaha Kecil Menengah, sedangkan Pemegang Saham BUMN akan tetap melanjutkan kebijakan penyisihan bagian laba Pemerintah sebesar 1 – 3 % yang digunakan untuk pembinaan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Koperasi serta bagi pengembangan masyarakat (*community development*). Operasional Pelaksanaannya oleh Kementrian BUMN serta dilaksanakan secara transparan meliputi sistem dan prosedur pengalokasian, penyaluran dan pengembaliannya. Saat ini kegiatan operasional itu dikenal dengan sebutan Program Kemitraan dengan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang diatur dalam SK Kementrian BUMN No.Kep\_236/MBU/2003 tentang program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), yang meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyisihkan 1-3% dari laba bersihnya untuk membantu masyarakat dimana mereka beroperasi dalam bentuk pinjaman modal kerja dan bantuan lingkungan.<sup>4</sup>

Salah satu Badan Usaha Milik Negara yang telah melaksanakan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil Menengah yaitu PT Jasa Marga (PERSERO), Tbk Cabang Purbaleunyi. Pelaksanaan Program Kemitraan BUMN dengan UKM pada PT Jasa Marga, Tbk Cabang Purbaleunyi mengacu pada Keputusan Direksi PT Jasa Marga (PERSERO), Tbk Nomor : 230/KPTS/2007 tentang Pelaksanaan Program Kemitraan dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan yang di adopsi dari Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per – 05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Program Kemitraan merupakan program penyaluran bantuan lunak bagi para pelaku usaha mikro dan industri rumah tangga yang menitikberatkan pada aspek permodalan awal dan modal kerja berjalan serta investasi saham. PT Jasa Marga, Tbk Cabang Purbaleunyi berupaya memberdayakan ekonomi rakyat melalui perluasan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja, dengan mengandeng usaha berskala mikro dan menengah sebagai mitra binaan melalui Program Kemitraan BUMN dengan UKM. Program tersebut diharapkan mampu mendorong potensi ekonomi rakyat dalam kerangka pemerataan pembangunan.

---

<sup>4</sup>Rachmat Winardi. 2006. “*Evaluasi Efektivitas dan Strategi Penyaluran Dana Kemitraan dengan Usaha Kecil di Perum Perhutani*”. Diakses di <http://elibrary.mb.ipb.ac.id> pada tanggal 1 Maret 2011 pk 18.30 WIB.

Adapun tujuan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil Menengah<sup>5</sup>, yaitu :

1. Mewujudkan usaha kecil yang tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba perusahaan.
2. Menciptakan daya gerak ekonomi kerakyatan disekitar wilayah operasional perusahaan menjadi meningkat dan pada akhirnya derajat kesejahteraan masyarakat pun dapat meningkat.

## STUDI LITERATUR

### Administrasi Publik

Chandler dan Plano dalam bukunya Yeremias Keban (2004 : 3), mengatakan bahwa Administrasi Publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk mengformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Chandler dan Plano menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan seni dan ilmu (*art and science*) yang ditujukan untuk mengatur "*public affairs*" dan melaksanakan tugas yang telah ditentukan<sup>6</sup>.

McCurdy (1986) dalam bukunya Yeremias keban (2008 : 3), dalam studi literturnya mengemukakan bahwa Administrasi publik dapat dilihat sebagai suatu proses politik, yaitu sebagai salah satu metode memerintah suatu negara dan dapat juga dianggap sebagai cara yang prinsipil untuk melakukan fungsi negara. Dengan kata lain administrasi publik bukan hanya sekedar persoalan manajerial tetapi juga persoalan politik<sup>7</sup>.

Nicholas Henry (1988) dalam bukunya Harbani Pasolong, mendefinisikan Administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktek, dengan tujuan mempromosi pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial<sup>8</sup>.

Dari beberapa definisi administrasi publik diatas, bahwa administrasi publik merupakan sebuah disiplin ilmu yang di dalamnya terdapat proses pembuatan kebijakan oleh aktor pemerintah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di masyarakat yang dilihat dari berbagai dimensi. Salah satu dimensi dalam administrasi publik yang mengkaji permasalahan

---

<sup>5</sup> PT Jasa Marga (PERSERO), Tbk. 2008. "*Panduan Corporate Social Responsibility*". Hal 4

<sup>6</sup> Harbani Pasolong. 2007. "*Teori Administrasi Publik*". Bandung, Alfabeta. Hal 7

<sup>7</sup> Yeremias T. Keban. 2008. "Enam Dimensi Strategis Adiministrasi Publik Konsep, Teori dan Isu". Yogyakarta, Gava Media. Hal 3

<sup>8</sup> Harbani Pasolong. *Op. Cit.* Hal 8

di masyarakat yaitu dimensi kebijakan. Dimensi kebijakan berkenaan dengan keputusan apa yang harus dikerjakan.

Seperti dalam penelitian ini yang mengevaluasi Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil Menengah, merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yaitu BUMN atau PT Jasa Marga, Tbk Cabang Purbaleunyi. Kebijakan tersebut dibuat dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada usaha kecil menengah seperti, kurangnya permodalan serta minimnya sumber daya manusia dalam mengelola dan mengembangkan usahanya. Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil Menengah oleh PT Jasa Marga, Tbk Cabang Purbaleunyi merupakan sebuah alternatif dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi.

### Kebijakan Publik

Michael Howlett dan M. Ramesh (1995, 7) dalam bukunya Riant Nugroho mengemukakan bahwa "*Public policy is a complex phenomenon consisting of numerous decisions made by numerous individual and organizations*". Kebijakan publik merupakan sebuah fenomena yang kompleks terdiri dari beberapa keputusan yang dibuat oleh berbagai individu dan organisasi.<sup>9</sup>

Harold Laswell dan Abraham Kaplan (1970, 71) dalam bukunya Riant Nugroho<sup>10</sup>, mendefinisikan Kebijakan Publik sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan praktik-praktik tertentu (*a projected program of goals, values, and practices*).

James Anderson (1984 : 3), *Public Policy Making* yang dikutip oleh Leo Agustino dalam bukunya "Dasar-Dasar Kebijakan Publik" memberikan pengertian atas definisi kebijakan publik sebagai berikut : "Serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan".<sup>11</sup>

Beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan sebuah fenomena yang kompleks dimana terjadi pengambilan beberapa keputusan mengenai suatu permasalahan atau hal-hal yang harus diperhatikan oleh individu atau suatu organisasi. Kebijakan ini diproyeksikan dengan suatu program yang memiliki tujuan-tujuan tertentu,

---

<sup>9</sup>*Ibid.*

<sup>10</sup> Riant Nugroho. 2009. "*Public Policy*". Jakarta, PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia. Hal 83

<sup>11</sup> Leo Agustino. 2008. "*Dasar-Dasar Kebijakan Publik*". Bandung, Alfabeta CV. Hal 7

maksud-maksud tertentu, nilai-nilai tertentu, dan praktik-praktik tertentu, kemudian dilakukan sebuah kegiatan untuk memenuhi maksud dan tujuan tersebut yang dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor.

William N. Dunn (1994) dalam bukunya Pasolong "Teori Administrasi Publik", menyatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintah, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain.<sup>12</sup>

Chandler dan Plano (1982) dalam *The Public Administration Dictionary*, menyatakan bahwa "*Public Policy is strategic use of resources to alleviate national problems or governmental concerns*". Secara sederhana dapat diartikan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah.<sup>13</sup>

Thomas R. Dye (1995 : 2) yang dikutip oleh Riant Nugroho dalam bukunya *Public Policy* mendefinisikan kebijakan publik sebagai "segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda".<sup>14</sup>

Carl I. Friedrich yang dikutip oleh Riant Nugroho dalam bukunya *Public Policy* memberikan sebuah definisi kebijakan publik sebagai "Serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada". Kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu.<sup>15</sup>

Peterson (2003: 1030) dalam bukunya Yeremias T Keban, berpendapat bahwa kebijakan publik secara umum dilihat sebagai aksi pemerintah dalam menghadapi masalah, dengan mengarahkan perhatian terhadap "siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana".<sup>16</sup>

Serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada". Kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada

---

<sup>12</sup> Harbani Pasolong. *Op Cit.* Hal 39

<sup>13</sup> Rosyadi. 2009. "*Definisi Kebijakan Publik*". Diakses di <http://arrosyadi.wordpress.com> pada tanggal 22 Maret 2010 pukul 13.55 WIB.

<sup>14</sup> Riant Nugroho. *Op Cit.* Hal 84

<sup>15</sup> *Ibid.* Hal 83

<sup>16</sup> Yeremias T. Keban. *Op Cit.* Hal 61

dalam rangka mencapai tujuan tertentu. aksi pemerintah dalam menghadapi masalah, dengan mengarahkan perhatian terhadap “siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana

Dari beberapa definisi kebijakan publik yang dikemukakan oleh beberapa ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa kebijakan publik adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat. Dengan keberagaman masalah yang terjadi di dalam masyarakat, maka sebuah kebijakan publik diharapkan dapat merespon secara baik aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Dengan kebutuhan yang beragam dan semakin besar, pemerintah pun harus memanfaatkan segala sumber daya yang ada seperti manusia, akal, dana pembuatan kebijakan dan lain-lain agar menghasilkan bentuk kebijakan yang ideal untuk memecahkan masalah tersebut. Diharapkan kebijakan publik yang nantinya diimplementasikan kepada masyarakat, dapat tepat guna siapa sasarannya, kapan dilaksanakannya kebijakan tersebut dan bagaimana cara melaksanakan kebijakan dengan baik dan tepat.

Peneliti mengangkat sebuah kebijakan publik yaitu SK Kementerian BUMN No.Kep\_236/MBU/2003 tentang program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang dilakukan oleh PT Jasa Marga Tbk Cabang Purbaleunyi. Jasa Marga melaksakan sebuah program kemitraan yaitu penyaluran bantuan lunak bagi para pelaku usaha mikro dan industri rumah tangga yang menitikberatkan pada aspek permodalan awal dan modal kerja berjalan serta investasi usaha. Jadi, Jasa Marga memberikan pinjaman modal usaha khususnya usaha kecil dan menengah (UKM) dimana UKM tersebut memiliki modal yang terbatas untuk mengembangkan usahanya.

### Evaluasi Kebijakan Publik

William M.K Trochim mendefinisikan evaluasi<sup>17</sup> yaitu “*Evaluation is the systematic assessment of the worth or merit of some object*”. Artinya penilaian secara sistematis atas nilai atau manfaat dari suatu objek.

Rossi dan Freeman menyatakan evaluasi digunakan untuk mempelajari tentang hasil yang diperoleh dalam suatu program untuk dikaitkan dalam pelaksanaannya, mengendalikan tingkah laku dari orang-orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program dan mempengaruhi respon dari mereka yang berada di luar lingkungan politik. Evaluasi tidak saja berguna untuk menjustifikasikan kegunaan dari program yang sedang berjalan tetapi juga

---

<sup>17</sup>William M.K Trochim. 2006. “*Introduction To Evaluation*”. Diakses di <http://www.socialresearchmethods.net>



untuk melihat kegunaan program dan inisiatif baru, peningkatan efektivitas manajemen dan administrasi program serta mempertanggungjawabkan hasil kepada pihak yang mensponsori program tersebut.<sup>18</sup>

Evaluasi kebijakan secara sederhana, menurut William Dunn (1999 : 608) dalam bukunya Leo Agustino Dasar-Dasar Kebijakan, berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai-nilai atau manfaat dari hasil kebijakan.<sup>19</sup>

Definisi lain mengenai evaluasi kebijakan diantaranya adalah definisi yang diungkapkan oleh Joseph S. Wholey, yaitu “*Policy evaluation is the assessment of overall effectiveness of national program in meeting its objectives, or an assessment of the relative effectiveness of two or more programs in meeting common objectives*”<sup>20</sup>. Evaluasi kebijakan adalah pengukuran dari keseluruhan efektivitas program nasional dalam menemukan sasaran, dan pengukuran dari efektivitas yang relative dua atau lebih program dalam menemukan sasaran bersama.

Evaluasi kebijakan merupakan suatu aktivitas untuk melakukan penilaian terhadap akibat – akibat atau dampak kebijakan dari berbagai program – program pemerintah. Pada studi evaluasi kebijakan telah dibedakan antara *policy impact/outcome* dan *policy output*. *Policy Impact/outcome* adalah akibat – akibat dan konsekuensi – konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya suatu kebijakan. *Policy output* ialah dari apapun yang telah dihasilkan dengan adanya program proses perumusan kebijakan pemerintah.<sup>21</sup>

James P.Lester dan Joseph Stewart,JR menyatakan “*Policy Evaluation is concerned with learning about the consequence of public policy*”. Evaluasi kebijakan difokuskan pada pembelajaran tentang konsekuensi dari kebijakan publik.

Dari beberapa tokoh di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan adalah penilaian keseluruhan dari aktivitas program nasional untuk menilai sejauh mana sasaran dapat tercapai, mengendalikan tingkah laku dari orang-orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan dan mempengaruhi respon dari mereka yang berada di luar lingkungan politik. Dengan adanya evaluasi, tidak hanya untuk menilai kegiatan yang sedang berjalan tersebut sesuai harapan atau tidak, tetapi juga dapat menghasilkan inisiatif-inisiatif baru untuk memodifikasi kebijakan awal agar menghasilkan peningkatan efektivitas

---

<sup>18</sup> Prof.Dr.Yeremias T.Keban. *Op Cit.* Hal 79

<sup>19</sup> Leo Agustino. *Op Cit.* Hal 187

<sup>20</sup> William Dunn. 1981. “*Public Policy Analysis*” an Introduction, London : Practice Hall International, inc. Hal 340

<sup>21</sup> *Ibid.* Hal 45

manajemen dan administrasi program serta bentuk pertanggungjawaban hasil kepada pihak yang mensponsori kebijakan tersebut. Evaluasi juga sebagai penilaian akibat-akibat yang ditimbulkan oleh aktivitas program tersebut karena suatu kebijakan akan menghasilkan konsekuensi-konsekuensi baik yang berdampak positif dan/atau negatif. Dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan publik adalah suatu proses untuk menilai pelaksanaan dan hasil akhir dari suatu kebijakan dan program publik apakah sesuai dengan tujuan, sasaran dan nilai yang ingin dicapai serta penilaian akibat-akibat yang ditimbulkan oleh aktivitas program apakah menghasilkan konsekuensi-konsekuensi baik yang berdampak positif dan/atau negatif.

Peneliti akan melaksanakan penelitian evaluasi kebijakan terhadap SK Kementerian BUMN No.Kep\_236/MBU/2003 tentang program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang dilakukan oleh PT Jasa Marga Tbk Cabang Purbaleunyi yang fokus terhadap program kemitraan BUMN yaitu PT Jasa Marga dengan usaha kecil dan menengah. Evaluasi ini dilakukan untuk menilai efektivitas program kemitraan dan dampak-dampak apa saja yang dihasilkan oleh kegiatan tersebut.

Menurut Kenneth M.Dolbeare, pada dasarnya *Public Policy Evaluation* ditekankan pada analisis dampak yang menilai proses/cara pencapaian suatu tujuan dimana hasil yang dicapai telah sesuai dengan tujuan kebijakan. Untuk mengetahuinya maka digunakan beberapa indikator untuk mengukur pencapaian tujuan/sasaran.<sup>22</sup>

Indikator yang dapat dijadikan acuan untuk menganalisis yaitu<sup>23</sup> :

1. Program

*“program is the basic unit of analysis for assessing policy impacts”*. Program adalah unit dasar dari analisis untuk menilai dampak dari kebijakan.

2. Objectives (tujuan)

*“Program objective maybe distinguished in term of procedural and outcome objectives”*. Tujuan dari program dapat dibedakan dari segi tujuan prosedural dan tujuan dari hasil yang diharapkan.

Tujuan prosedural memperhatikan kinerja dari fungsi administrasi oleh agensi yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan keseluruhan program. Pada dasarnya tujuan prosedural mengenai sasaran yang relevan pada administrasi internal program

---

<sup>22</sup> Thomas J.Cook dan Frank P.Scioli, *Public Policy Evaluation volume II* ( Sage yearbooks in Politics and Public Policy,1975). Hal 97

<sup>23</sup>*Ibid.* Hal 96

(implementasi program dan pelayanan). Sedangkan tujuan dari hasil yang diharapkan adalah mengatur target eksternal pada operasi program dimana kinerja program dapat dievaluasi.

3. Activities (kegiatan)

*“Program activities refers to the spesific content of program implementation”.*

Aktivitas/kegiatan program berkenaan dengan isi yang spesifik dari implementasi program.

4. Effectiveness Criteria

*“Program effectiveness criteria refers to the spesific performance measures associated with each outcome objective”.* Penilaian hasil yang dihubungkan dengan keluaran dari tujuan.

5. Impact (dampak)

Akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya suatu kebijakan. Suatu keadaan yang ingin/tidak dicapai baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Impact (dampak) terbagi atas primary impact (hasil yang harus segera dicapai) dan secondary impact (konsekuensi jangka panjang).

Adapun alasan penulis menggunakan konsep teori evaluasi menurut Kenneth M. Dolbear terhadap Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Menengah oleh PT Jasa Marga, Tbk Cabang Purbaleunyi untuk melihat keefektifan dari sebuah pelaksanaan kebijakan dengan mendeskripsikan hasil yang dicapai serta dampak-dampak yang terjadi setelah program tersebut dilaksanakan.

### Evaluasi Program

Untuk menilai sebuah keberhasilan kebijakan ataupun program, perlu dilakukannya evaluasi terhadap program secara berkala. Ellen Taylor mendeskripsikan Evaluasi Program adalah *“Program evaluation refers to the thoughtful process to focusing on questions and topics of concern, collecting appropriate information, and then analyzing and interpreting the information for a specific use purpose”*<sup>24</sup>. Artinya Program evaluasi mengacu pada proses berpikir untuk memfokuskan pertanyaan-pertanyaan dan topik-topik, mengumpulkan informasi yang tersedia, dan setelah itu menganalisa dan menginterpretasikan informasi tersebut untuk sebuah penggunaan tujuan yg spesifik.

---

<sup>24</sup> University Of Wisconsin Extension. 1996. *“Planning A Program Evaluation”*. Diakses di <http://www.portal.mohe.gov.my> pada tanggal 2 Maret 2011 pkl 20.50 WIB.

Environmental Protection Agency (EPA) mengungkapkan definisi yang berbeda yaitu “*Program Evaluation is a systematic way to learn from past experience by assessing how well a program is working. A focused program evaluation will examine specifically identified factors of a program in a more comprehensive way than from experience that occurs day-to-day*”<sup>25</sup>. Evaluasi Program merupakan sebuah cara pembelajaran yang sistematis berdasarkan pengalaman masa lalu dengan menilai bagaimana suatu program dilaksanakan dengan baik. Fokus evaluasi program yaitu akan menguji factor-faktor identitas khusus dari sebuah program dengan cara yang lebih komprehensif dibandingkan dengan menguji pengalaman sehari-hari.

“*Program evaluation is the systematic assessment of the operation and/or outcomes of a program or policy, compared to a set of explicit or implicit standards as a means of contributing to the improvement of the program or policy*”. Evaluasi Program adalah penilaian secara sistematis pada sebuah operasi atau hasil dari sebuah program / kebijakan, dengan membandingkan seperangkat standar eksplisit atau implisit sebagai sarana dalam memberikan kontribusi bagi perbaikan program atau kebijakan.<sup>26</sup>

Menurut Pemerintah Federal Amerika Serikat yang di kutip oleh Mu'man Nuryana dalam Karya Tulisnya yaitu “*Program Evaluation*” terdapat pengertian evaluasi program yaitu “*A systematic study conducted to assess how well a program is working...typically focused on achievement of program objectives*”<sup>27</sup>. Artinya sebuah studi sistematis yang dilakukan untuk menguji bagaimana sebuah program berkerja dengan baik....yang secara tipikal focus pada pencapaian tujuan program.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, bahwa Evaluasi Program merupakan sebuah studi yang sistematis dalam melakukan penilaian terhadap sebuah program atau kebijakan yang telah diimplementasikan.

## Efektivitas

---

<sup>25</sup> US. Environmental Protection Agency. 2009. “*What Is Program Evaluation and Performance Measurement*”. Diakses di <http://www.epa.gov> pada tanggal 2 Maret 2010 pkl 21.05 WIB.

<sup>26</sup> Carol Weiss, quoted in. “*Introduction to Program Evaluation*”. Diakses di <http://www.cdc.gov> pada tanggal 2 Maret 2011 pkl 21.10 WIB.

<sup>27</sup> Mu'man Nuryana, Kepala Biro Perencanaan Departemen Sosial R.I. “*Program Evaluation*”. Diakses di <http://www.depsos.go.id> pada tanggal 1 Maret 2011 pkl 19.15 WIB.

Keefektifan selalu dikaitkan dengan sebuah organisasi, bahwasannya organisasi yang efektif apabila menjalankan sebuah program atau kebijakan dapat mencapai tujuan yang telah dirumuskan dalam program atau kebijakan tersebut.

Menurut Michael C. Lemay, dalam mengevaluasi program terdapat beberapa kriteria yang dapat digunakan, salah satunya adalah efektivitas. “*Effectiveness, which determines the relationship of an organization’s outputs to what an organization is intended to accomplish.*”

Efektivitas menjelaskan hubungan antara keluaran organisasi dengan yang seharusnya tercapai. Dalam pengukurannya dapat dihitung dengan nilai persentase atas pencapaian dengan sasaran yang telah ditetapkan.<sup>28</sup>

Efektivitas menurut Hadayaningrat dalam buku *Azas-azas Organisasi Manajemen* adalah sebagai berikut “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya” (Handayaningrat, 1995:16).<sup>29</sup>

Sondang P. Siagian (1981;151) yang dikutip oleh Ruswati dalam tugas akhirnya Efektivitas Pelayanan Publik berpendapat bahwa efektivitas<sup>30</sup> terkait penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan sebelumnya atau dapat dikatakan apakah pelaksanaan sesuatu tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya.

Menurut Fremons E yang dikutip oleh Sugiono dalam bukunya *Metode Penelitian Organisasi* bahwa efektivitas<sup>31</sup> berkenaan dengan derajat pencapaian tujuan baik secara eksplisit maupun implicit, yaitu seberapa jauh dapat dilaksanakan dan seberapa jauh tujuan tercapai.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu penelitian di bidang sosial dengan menggunakan teknik kualitatif dengan cara atau teknik untuk menggali suatu fenomena sosial secara mendalam.

---

<sup>28</sup> Michael C. Lemay, “*Public Administration: Clashing values in the Administration of Public Policy, 2nd edition*”. ( USA : Cengage Advertisement). sHal 212.

<sup>29</sup> “*Pengertian Efektivitas Program*”. Diakses di <http://docs.google.com> pada tanggal 2 Maret 2011 pkl 19.30 WIB.

<sup>30</sup> Ruswati. 2005. “*Efektivitas Pelayanan Publik*”. Universitas Jenderal Soedirman. Diakses di <http://www.freewebs.com> pada tanggal 2 Maret 2011 pkl 19.35 WIB.

<sup>31</sup> Sugiono. 2004. “*Metode Penelitian Organisasi*”. Bandung, Alfabeta. Hal 23

Menurut Bagdan dan Taylor (dalam bukunya Lexy. J. Moleong) penelitian kualitatif<sup>32</sup> adalah, Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Creswell, (1998:15) mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami.<sup>33</sup>

Penelitian kualitatif dapat dikonstruksi sebagai suatu strategi yang didalamnya lebih menekankan kata-kata dari pada kuantifikasi dalam pengumpulan data, analisis data, menekankan pendekatan induktif untuk hubungan antara teori dan penelitian, yang tekanannya pada penempatan penciptaan teori (*generate of theory*). Menurut Creswell yang dikutip oleh Ulber Silalahi dalam bukunya *Metode Penelitian Sosial* mendefinisikan penelitian kualitatif “sebagai suatu proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial berdasarkan pada penciptaan gambaran holistic lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pada informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar alamiah.<sup>34</sup>

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>35</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian metode penelitian kualitatif menurut para ahli, peneliti mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai sebuah teknik untuk menggali dan menyelidiki suatu fenomena sosial yang terjadi di masyarakat berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik lengkap yang di deskripsikan dengan kata-kata dan melaporkan pada informan secara terperinci.

## Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>32</sup> Lexy J. Moleong. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Rosdakarya, Bandung. Hal 49

<sup>33</sup> Iyan Afriani. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Diakses di <http://www.penalaran-unm.org> pada tanggal 28 maret 2010 pkl 17.15 WIB

<sup>34</sup> Ulber Silalahi. 2006. “*Metode Penelitian Sosial*”. Bandung, Unpar Press. Hal 70

<sup>35</sup> Sugiyono. *Op Cit*. Hal 9

Dalam penelitian kualitatif, peneliti menggunakan beberapa macam teknik dalam mengumpulkan data-data yang dibutuhkan.

## Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan – pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.<sup>36</sup>

Definisi wawancara menurut Esterberg yang dikutip oleh Sugiyono dalam bukunya *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*; 2009, bahwa wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>37</sup>

Wawancara dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu wawancara terstruktur, wawancara semiterstruktur dan wawancara tak berstruktur. Dalam wawancara terstruktur peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan penelitian tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Wawancara semiterstruktur sudah termasuk dalam kategori *in-dept interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan wawancara terstruktur. Sedangkan wawancara tak berstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semiterstruktur. Wawancara semiterstruktur termasuk dalam kategori *in-dept interview* dan pelaksanaannya lebih bebas. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta ide dan pendapatnya.<sup>38</sup>

Di dalam proses wawancara mendalam, peneliti mewawancarai beberapa responden yaitu :

- a. Staff Bidang Organisasi, Sumber Daya Manusia Sub Bag PU dan PKBL

---

<sup>36</sup> DR. Deddy Mulyana, M.A. *Metodologi Penelitian Kualitatif : Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung : PT.Remaja Rosdakarya, 2001). Hal 180.

<sup>37</sup> Sugiyono. *Op. Cit.* Hal 231

<sup>38</sup> *Ibid.* Hal 233

b. Usaha Kecil Menengah sebagai mitra binaan dari PT Jasa Marga, Tbk

### Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan pengamatan jarak jauh, artinya penulis atau peneliti tidak terlibat secara langsung ke dalam aktifitas objek dari penelitian tersebut.<sup>39</sup> Observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah observasi tidak berstruktur, peneliti mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengarkan apa yang mereka ucapkan serta peneliti harus mengembangkan daya pengamatannya dikarenakan observasi yang dilakukan tanpa menggunakan guide. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan perasaan. Alasan peneliti melakukan observasi adalah untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.<sup>40</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi dengan mendatangi usaha kecil menengah yang telah menjadi mitra binaan PT Jasa Marga, Tbk Cabang Purbaleunyi tahun 2008 untuk melakukan peninjauan terhadap usahanya.

### Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Menurut Guba dan Lincoln, dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film. Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.<sup>41</sup>

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen terbagi menjadi tiga, berbentuk tulisan, gambar serta karya. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup,

---

<sup>39</sup> *Ibid.* hal 227

<sup>40</sup> Iyan Afriani. 2009. "Metode Penelitian Kualitatif". Diakses di <http://www.penalaran-unm.org> pada tanggal 2 Maret 2011 pkl 19.40 WIB.

<sup>41</sup> Lexy J Moleong. *Op. Cit.* Hal 216



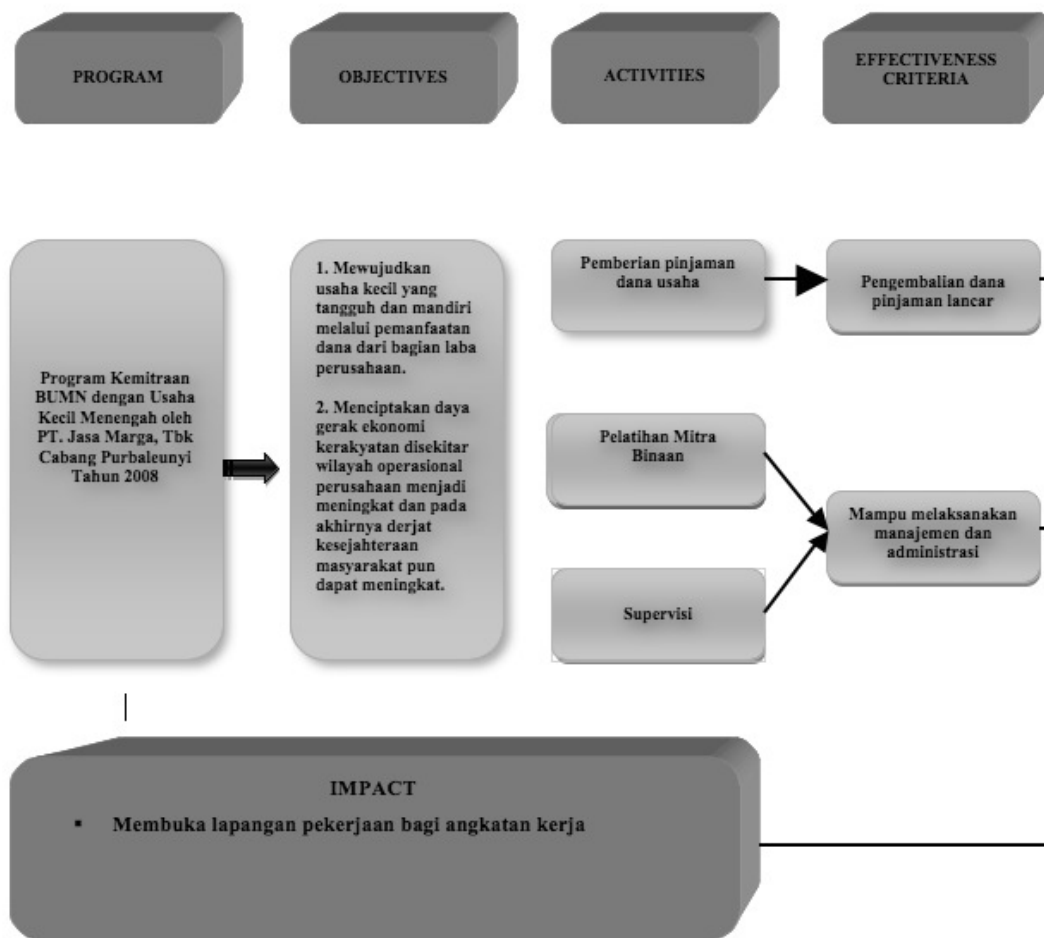
sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain.

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan lebih kredibel atau dapat dipercaya, jika didukung dengan dokumen-dokumen terdahulu yang dapat memperkuat hasil penelitian.<sup>42</sup>

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dokumen – dokumen yang berhubungan dengan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil Menengah oleh PT Jasa Marga, Tbk Cabang Purbaleunyi. Dokumen – dokumen tersebut yaitu Modul PT Jasa Marga, Tbk, Panduan *Corporate Social Responsibility* (CSR), Data mitra binaan PT Jasa Marga, Tbk Cabang Purbaleunyi tahun 2008, Modul Panduan Supervisi serta Keputusan Direksi PT Jasa Marga (PERSERO), Tbk Nomor 230/KPTS/2007 tentang Program Kemitraan dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Dokumen – dokumen tersebut digunakan sebagai salah satu alat pembantu dalam melakukan analisis evaluasi program tersebut.

---

<sup>42</sup> Sugiyono. *Op. Cit.* Hal 240



**Gambar 1 Model Penelitian**

## **A. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Program kemitraan Jasa Marga diimplementasikan ke dalam dua bentuk yaitu bentuk bantuan pinjaman usaha dan dalam bentuk hibah. Bantuan pinjaman ini ditujukan kepada usaha mikro dan mitra binaan lainnya agar mereka terbantu dari segi permodalan dan investasi dalam upaya meningkatkan kinerja dan skala usaha. Pengguliran dana ini diharapkan mampu memberi dampak bagi perluasan kesempatan usaha serta penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat di lingkungannya.

Oleh sebab itu, tujuan akhir program tersebut diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara lebih luas dan tidak semata untuk pengembangan usaha mitra binaan Jasa Marga itu sendiri. Dari situlah keberhasilan pembinaan Jasa Marga dapat diukur yaitu bagaimana mitra binaan tersebut mampu memberikan manfaat sebesar – besarnya bagi dirinya maupun masyarakat di lingkungannya.

Dana pelaksanaan program kemitraan berasal dari laba bersih perseroan yang disisihkan sebesar maksimal 2% untuk pendanaan program kemitraan tersebut. Selain menyalurkan bantuan dalam bentuk uang, Jasa Marga menyelenggarakan program pendampingan yang bertujuan untuk meningkatkan akselerasi kinerja dan produktivitas UKM. Program ini diberikan secara hibah artinya difasilitasi sepenuhnya oleh Jasa Marga. Program ini mencakup penyelenggaraan pendidikan dan latihan di bidang manajemen usaha kecil serta melibatkan mitra binaan dalam ajang pameran dan promosi di dalam dan luar negeri. Melalui diklat ini, diharapkan UKM memperoleh pengetahuan dan inspirasi tentang pengelolaan usaha secara modern.

#### Program

Dalam rangka mengurangi dan meminimalisir permasalahan yang dihadapi oleh Usaha Kecil Menengah (UKM) diperlukan suatu badan yang berfungsi sebagai pembantu dan bersifat sebagai pembina. Dimana badan tersebut dapat berasal dari perusahaan-perusahaan yang telah maju dan berkembang pesat serta dapat melakukan tanggung jawab sosialnya (*Corporate Social Responsibility*) masing-masing, dalam hal ini perusahaan tersebut adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyediakan fasilitas kredit untuk mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah.

Bahwasannya kepedulian pemerintah dalam hal ini Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terhadap Usaha Kecil Menengah (UKM) telah ada sejak lama. Pada tahun 1989 Pemerintah RI melalui Departemen Keuangan, mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1232/KMK.013/1989 yang mewajibkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyisihkan 1 – 5 % keuntungannya untuk Pembinaan Usaha Kecil Menengah, sedangkan Pemegang Saham BUMN akan tetap melanjutkan kebijakan penyisihan bagian laba Pemerintah sebesar 1 – 3 % yang digunakan untuk pembinaan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Koperasi serta bagi pengembangan masyarakat (*community development*). Operasional Pelaksanaannya oleh Kementrian BUMN serta dilaksanakan secara transparan

meliputi sistem dan prosedur pengalokasian, penyaluran dan pengembaliannya. Saat ini kegiatan operasional itu dikenal dengan sebutan Program Kemitraan dengan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang diatur dalam SK Kementerian BUMN No.Kep\_236/MBU/2003 tentang program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), yang meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyisihkan 1-3% dari laba bersihnya untuk membantu masyarakat dimana mereka beroperasi dalam bentuk pinjaman modal kerja dan bantuan lingkungan.<sup>43</sup>

Salah satu Badan Usaha Milik Negara yang telah melaksanakan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil Menengah yaitu PT Jasa Marga (PERSERO), Tbk Cabang Purbaleunyi. Pelaksanaan Program Kemitraan BUMN dengan UKM pada PT Jasa Marg, Tbk Cabang Purbaleunyi mengacu pada Keputusan Direksi PT Jasa Marga (PERSERO), Tbk Nomor : 230/KPTS/2007 tentang Program Kemitraan dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Program Kemitraan merupakan program penyaluran bantuan lunak bagi para pelaku usaha mikro dan industri rumah tangga yang menitikberatkan pada aspek permodalan awal dan modal kerja berjalan serta investasi usaha. PT Jasa Marga, Tbk Cabang Purbaleunyi berupaya memberdayakan ekonomi rakyat melalui perluasan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja, dengan mengandeng usaha berskala mikro dan menengah sebagai mitra binaan melalui Program Kemitraan BUMN dengan UKM. Program tersebut diharapkan mampu mendorong potensi ekonomi rakyat dalam kerangka pemerataan pembangunan.

### Tujuan

Tujuan dari Program Kemitraan BUMN dengan UKM terbagi menjadi dua bagian, yaitu mewujudkan usaha kecil yang tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba perusahaan serta menciptakan daya gerak ekonomi kerakyatan disekitar wilayah operasional perusahaan menjadi meningkat dan pada akhirnya derajat kesejahteraan masyarakat pun dapat meningkat. Pencapaian kedua tujuan tersebut tidak bisa dalam kurun waktu yang singkat, melainkan secara bertahap dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Pencapaian tujuan secara bertahap dapat terlihat dari kemajuan manajemen usaha mitra binaan PT Jasa Marga, Tbk Cabang Purbaleunyi dalam hal sumber daya manusia dan keuangan.

### Kegiatan

---

<sup>43</sup> Rachmat Winardi. 2006. "Evaluasi Efektivitas dan Strategi Penyaluran Dana Kemitraan dengan Usaha Kecil di Perum Perhutani". Diakses di <http://elibrary.mb.ipb.ac.id> pada tanggal 1 Maret 2011 pk 18.30 WIB.

Dalam pelaksanaan Program Kemitraan BUMN dengan UKM oleh PT Jasa Marga, Tbk Cabang Purbaleunyi memiliki kegiatan – kegiatan sebagai upaya untuk tercapainya tujuan. Terdapat tiga kegiatan, yaitu pemberian pinjaman dana usaha, pelatihan mitra binaan dan supervisi. Pemberian pinjaman dana usaha merupakan inti kegiatan dari Program Kemitraan. PT Jasa Marga, Tbk Cabang Purbaleunyi harus mampu memilih calon mitra binaan secara tepat. Ketepatan memilih calon mitra binaan merupakan sesuatu yang penting, peminjaman modal usaha harus diberikan kepada UKM yang benar – benar membutuhkan dana untuk tambahan modal usahanya. Selain itu, persyaratanpun menjadi hal yang mutlak harus dipenuhi oleh masing – masing UKM yang akan menjadi mitra binaan dan akan mendapatkan pinjaman modal usaha.

Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh UKM atau calon mitra binaan, yaitu :

1. Kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00.
3. Milik Warga Negara Indonesia.
4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar.
5. Berbentuk usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.
6. Usaha sudah berjalan minimal 1 (satu) tahun serta mempunyai potensi dan prospek untuk dikembangkan.
7. Tidak sedang menjadi mitra binaan BUMN lain.
8. Belum memenuhi persyaratan perbankan (non bankable)
9. Mengisi formulir dari PT.Jasa Marga.

Pelatihan, Dalam program mitra binaan ini, PT. Jasa Marga, Tbk tidak hanya sekedar memberikan sebatas bantuan peminjaman modal saja, tetapi Jasa Marga juga memberikan sejenis pelatihan mitra binaan bagi mitra binaan yang dikategorikan lancar dalam melunasi pembayaran pinjaman modal dan mitra binaan yang dapat dikatakan berhasil dalam usahanya. Beberapa kategori kualitas pinjaman mitra binaan adalah :

Pinjaman lancar, Pembayaran angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman tepat waktu atau terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan atau jasa administrasi selambat-lambatnya 30 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.

Pinjaman kurang lancar

Keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 30 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.

Pinjaman diragukan

Keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 90 hari dan belum melampaui 180 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.

Pinjaman macet

Keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 180 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.

Supervisi, salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh PT Jasa Marga, Tbk Cabang Purbaleunyi yaitu melalui supervisi, yang biasanya dilaksanakan setelah diadakannya pelatihan. Dalam pelatihan, mitra binaan dibekali materi yang cukup banyak mengenai usahanya yaitu seperti rekrutmen, pembuatan laporan keuangan, mengatasi masalah, promosi, produksi dan lainnya. Untuk mengetahui hasil dari pelatihan mitra binaan, staff PU dan PKBL melaksanakan supervisi, yang bertujuan untuk:

Mengetahui pemahaman mitra binaan terhadap materi pelatihan yang telah diberikan.

Mengetahui sejauhmana materi pelatihan dapat diaplikasikan dalam kegiatan usaha mitra binaan.

Memberikan bantuan bimbingan konsultasi usaha terhadap kekurangan dalam pelaksanaan usaha mitra binaan.

Membina hubungan yang lebih erat antara pembina dan mitra binaan sehingga pembina dapat melakukan monitoring secara efektif terhadap mitra binaan. Tahapan dalam supervisi ada 3 tahap, yang terdiri dari :

1. Identitas kelembagaan : bidang organisasi, nama perusahaan, badan hukum perusahaan dan status kepemilikan.

2. Materi pendukung supervisi : bidang manajemen produksi, lay out tempat produksi, manajemen pemasaran dan keuangan.
3. Materi pokok supervisi : target market, penerapan strategi produk dan harga, penerapan strategi promosi dan distribusi.

Supervisi yang seperti dijelaskan oleh staf program kemitraan, benar – benar dilakukan oleh Jasa Marga kepada UKM yang diberi tanggung jawab pinjaman modal. Jasa Marga masih bertanggung jawab kepada mitra binaannya demi tujuan program kemitraan ini yaitu kemajuan usaha UKM, UKM tidak hanya memperkaya usahanya tetapi juga dapat membina dan memberdayakan lingkungan sekitarnya seperti membuka lapangan kerja dengan orang lain.

Pelaksanaan supervisi yang dilakukan oleh staff PU dan PKBL sebanyak 3 kali menggunakan metode yang berbeda – beda. beberapa metode yang berbeda. Beberapa metode yang digunakan dalam melakukan supervisi yaitu :

1. Kunjungan langsung berupa observasi dan wawancara
2. Analisis dari data dan informasi
3. Penilaian
4. Konsultasi usaha
5. Rekomendasi

#### Kriteria Efektivitas

Program kemitraan ini memang diperuntukkan bagi usaha kecil dan menengah yang memiliki kekayaan bersih di bawah Rp. 200.000.000,-. Beberapa UKM sangat merasakan keuntungan dan manfaat yang besar dari program ini, namun ada juga yang tidak merasakan manfaat yang optimal dari program ini. Jasa Marga tentu tidak bisa melarang penggunaan pinjaman modal untuk membiayai kebutuhan pribadi. Walaupun digunakan untuk kebutuhan dan biaya rumah tangga pribadi, Jasa Marga menganggap bahwa pada akhirnya UKM tersebut dapat melunasi pinjaman modal beserta bunganya. Pengembalian pinjaman Jasa Marga dapat dikatakan lancar karena menurut hasil wawancara dengan staf PU dan PKBL, setiap bulannya pasti ada yang membayar cicilan pinjaman modal tetapi ada yang membayar setengah dari kewajiban bulannya, ada yang sepenuhnya, ada juga yang membayar dalam 1 bulan dengan kewajiban 3 bulan. Namun, sebaiknya setiap UKM harus membayar cicilan sesuai dengankewajibannya yang harus dibayarkan setiap bulan karena Jasa Marga memiliki target pembayaran cicilan pinjaman modal setiap bulannya.

## Dampak

Membuka lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja, tujuan program mitra binaan PT. Jasa Marga, Tbk dengan Unit Usaha Kecil dan Menengah (UKM) adalah :

1. Mewujudkan usaha kecil yang tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba perusahaan.
2. Menciptakan daya gerak ekonomi kerakyatan di sekitar wilayah operasional perusahaan menjadi meningkat dan pada akhirnya derajat kesejahteraan masyarakat pun dapat meningkat.

Jasa Marga adalah salah satu badan yang berfungsi juga sebagai pembantu yang bersifat pembina yang melakukan tanggung jawab sosialnya (*Corporate Social Responsibility*) masing – masing, dalam hal ini perusahaan tersebut adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyediakan fasilitas kredit untuk mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah. Oleh sebab itu, Jasa Marga melaksanakan sebuah program kemitraan yaitu memberikan pinjaman modal kepada UKM yang dinilai memiliki kesulitan dalam pengadaan modal dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Peneliti menilai bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat memiliki banyak aspek pendukung untuk mengukur hal tersebut. Salah satunya adalah terbukanya lapangan kerja baru bagi angkatan kerja. Dengan program mitra binaan ini, UKM terbantu dalam hal pengadaan modal usaha. Peningkatan usaha tidak hanya dinilai dengan meningkatnya keuangan perusahaan, namun perusahaan dalam bentuk apapun akan melakukan ekspansi seluas – luasnya dalam hal pemasaran, penjualan, promosi, dan tentunya saat perusahaan melakukan kegiatan tersebut, dia akan sangat membutuhkan sumber daya – sumber daya untuk menggerakannya, salah satunya manusia.

## **B. PENUTUP**

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai Program Kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan menengah oleh PT Jasa Marga, Tbk Cabang Purbaleunyi sudah berjalan efektif. Keefektifan pelaksanaan Program Kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan menengah dapat dilihat melalui beberapa variable, yaitu :



### 1. Program

Program Kemitraan BUMN dengan UKM merupakan sebuah wujud kepedulian pemerintah terhadap permasalahan yang dihadapi oleh UKM di Indonesia. PT Jasa Marga, Tbk Cabang Purbaleunyi merupakan salah satu BUMN yang telah melaksanakan program tersebut, dengan menyisihkan laba perusahaannya 1 – 3 % yang akan disalurkan kepada UKM dalam bentuk pinjaman modal usaha. Program Kemitraan BUMN dengan UKM yang dilakukan oleh PT Jasa Marga, Tbk Cabang Purbaleunyi sangat membantu para UKM yang memiliki kelemahan dalam hal permodalan.

### 2. Tujuan

Tujuan dari Program Kemitraan BUMN dengan UKM terbagi menjadi dua bagian, yaitu mewujudkan usaha kecil yang tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba perusahaan serta menciptakan daya gerak ekonomi kerakyatan disekitar wilayah operasional perusahaan menjadi meningkat dan pada akhirnya derajat kesejahteraan masyarakat pun dapat meningkat. Pencapaian kedua tujuan tersebut tidak bisa dalam kurun waktu yang singkat, melainkan secara bertahap dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Pencapaian tujuan secara bertahap dapat terlihat dari kemajuan manajemen usaha mitra binaan PT Jasa Marga, Tbk Cabang Purbaleunyi dalam hal sumber daya manusia dan keuangan.

### 3. Kegiatan

Dalam Program Kemitraan BUMN dengan UKM oleh PT Jasa Marga, Tbk Cabang Purbaleunyi memiliki tiga kegiatan yaitu pemberian pinjaman dana usaha, pelatihan mitra binaan dan supervisi.

- Pemberian pinjaman dana usaha kepada UKM merupakan kegiatan utama dalam Program Kemitraan. Prosedur dalam mengikuti Program Kemitraan tidak sulit, UKM hanya memenuhi syarat yang telah ditentukan, mengisi proposal yang diberikan oleh PT Jasa Marga, Tbk Cabang Purbaleunyi. Bunga pinjaman modal usaha tidak terlalu besar, sehingga tidak memberatkan mitra binaan dalam membayar angsuran cicilan yang dilakukan setiap bulan.
- Pelatihan mitra binaan hanya ditujukan untuk mitra binaan yang dikategorikan lancar dalam pengembalian cicilan angsuran. Pelatihan ini sangat bermanfaat bagi para mitra binaan (UKM), khususnya untuk usahanya karena materi yang diberikan dalam

pelatihan mengenai manajemen usaha dalam hal sumber daya manusia, keuangan, promosi serta daya saing.

- Supervisi merupakan bentuk pengawasan dari PT Jasa Marga, Tbk Cabang Purbaleunyi terhadap mitra binaannya atas pelatihan yang telah diberikan. Supervisi dilakukan dalam tiga tahap yaitu organisasi, manajemen usaha dan distribusi. Metode yang digunakan kunjungan, data atau informasi dan konsultasi.

#### 4. Kriteria Efektif

Program Kemitraan BUMN dengan UKM oleh PT Jasa Marga, Tbk Cabang Purbaleunyi sudah efektif. Kefektifan tersebut dilihat dari adanya pengembalian pinjaman cicilan yang lancar. Tidak hanya itu, pelaksanaan pelatihan mitra binaan yang efektif juga memberikan kemajuan pada UKM secara bertahap melalui pengelolaan usaha yang semakin baik dari segi sumber daya manusia, pencatatan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi dan cara promosi serta memiliki daya saing yang kuat.

#### 5. Dampak

Pelaksanaan Program Kemitraan BUMN dengan UKM memunculkan dampak yang positif bagi masyarakat luas. Dampak yang terjadi dengan adanya program tersebut yaitu membuka lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja. Seiring dengan peningkatan dan kemajuan usaha tentunya kebutuhan karyawanpun semakin meningkat. Dengan adanya hal tersebut dapat memunculkan lapangan pekerjaan.

#### Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, penulis memiliki beberapa saran yang ditujukan kepada Staff PU dan PKBL PT Jasa Marga, Tbk Cabang Purbaleunyi dalam melaksanakan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Menengah. Beberapa saran tersebut, yaitu :

- Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Menengah, karena usaha kecil dan menengah di Indonesia masih sangat lemah dalam hal permodalan serta sumber daya manusia.
- Demi terbentuknya usaha kecil menengah yang tangguh dan mandiri, perlu adanya pelatihan bagi mitra binaan yang dilakukan secara berkesinambungan. Khususnya pelatihan mengenai pengelolaan sumber daya manusia dan pencatatan keuangan sesuai dengan standar akuntansi sederhana.

- Ketepatan dalam menyaring calon mitra binaan dalam proses penyaluran dana program kemitraan.

## DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo, 2008, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta CV.

Carol Weiss, quoted in. “*Introduction to Program Evaluation*”. Diakses di <http://www.cdc.gov>

Cook, Thomas J dan Scioli, Frank P, 1975, *Public Policy Evaluation volume II*. ( Sage yearbooks in Politics and Public Policy).

Dunn, William, 1981, *Public Policy Analysis. an Introduction*, London : Practice Hall International, inc.

Keban, Yeremias. T, 2008, *Enam Dimensi Strategis Adiministrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta : Gava Media.

Lemay. Michael C. *Public Administration : Clashing values in the Administration of Public Policy, 2nd edition*. USA : Cengage Advertisement.

Mulyana.Deddy. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung : PT.Remaja Rosdakarya.

Moleong Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung : PT Remaja RosdaKarya.

Nugroho, Riant, 2009, *Public Policy*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.

Pasolong, Harbani, 2007, *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.

Silalahi, Ulber, 2006, *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : Unpar Press.

Singarimbun, Masri, 1995, *Metode Penelitian Survei*. Jakarta : Ghalin Indonesia.

Sugiono, 2004, *Metode Penelitian Organisasi*. Bandung : Alfabeta.

Keputusan Direksi PT Jasa Marga (PERSERO), Tbk. Nomor : 230/KPTS/2007 Tentang Program Kemitraan Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Modul PT Jasa Marga, Tbk. *Profil dan Laporan Perusahaan*.

PT Jasa Marga (PERSERO), Tbk. *Panduan Corporate Social Responsibility*.

Iyan Afriani. 2009. *Metode Peneltian Kualitatif*. Diakses di <http://www.penalaran-unm.org>  
Komunitas Perbankan. 2011. “*Artikel tentang Usaha Kecil Menengah*”. Diakses di <http://banking.blog.gunadarma.ac.id>

- Mu'man Nuryana, Kepala Biro Perencanaan Departemen Sosial R.I. "*Program Evaluation*". Diakses di <http://www.depsos.go.id>
- PT Jasa Marga, Tbk. 2011. "*Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*". Diakses di <http://www.jasamarga.com>
- Rachmat Winardi. 2006. "*Evaluasi Efektivitas dan Strategi Penyaluran Dana Kemitraan dengan Usaha Kecil di Perum Perhutani*". Diakses di <http://elibrary.mb.ipb.ac.id>
- Ruswati. 2005. "*Efektivitas Pelayanan Publik*". Universitas Jenderal Soedirman. Diakses di <http://www.freewebs.com>
- University Of Wisconsin Extension. 1996. "*Planning A Program Evaluation*". Diakses di <http://www.portal.mohe.gov.my>
- US. Environmental Protection Agency. 2009. "*What Is Program Evaluation and Performance Measurement*". Diakses di <http://www.epa.gov>
- Wardoyo dan Hendro Prabowo. "*Kinerja Lembaga Keuangan Mikro bagi Upaya Penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Di Wilayah Jabotabek*". Diakses di <http://docs.google.com>
- William M.K Trochim. 2006. "*Introduction To Evaluation*". Diakses di <http://www.socialresearchmethods.net>
- Yudhislibra. "Usaha Kecil Menengah di Indonesia". Diakses di <http://yudhislibra.wordpress.com>